BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peranan dan keberadaan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Selama krisis ekonomi, koperasi dan UKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik serta telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja, pemberian pelayanan ekonomi yang luas dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data laporan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, sampai dengan tahun 2010, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 177.482 unit, sedangkan jumlah populasi UKM mencapai 53,8 juta unit usaha atau 99,99 persen dari total unit usaha. Ditinjau dari kontribusi koperasi dan UKM terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), tercatat pada tahun 2010 besaran PDB yang diciptakan mencapai nilai sekitar Rp. 3.000 triliun atau 57,12 persen dari total PDB nasional. Besarnya kontribusi juga terlihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja dari sektor koperasi dan UKM ini, yaitu hingga tahun 2010 sebanyak 99,4 juta atau 97,22% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (www.diskop.go.id).

Dalam sektor ini terdapat potensi yang besar dalam menunjang perekonomian masyarakat Indonesia sehingga harus di kelola dan dikembangkan dengan baik. Pada kenyataannya sektor koperasi dan UKM juga sulit berkembang menjadi lebih besar walaupun sektor ini telah dibantu oleh pemerintah dalam segi

permodalan, namun kendala utama pada koperasi maupun UKM ialah masalah manajemen dalam pengelolaan keuangan yang kurang profesional. Dalam pengelolaan keuangan diperlukan keterampilan akuntansi yang baik oleh pelaku usaha.

Praktek akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Wahdini dan Suhairi, 2006). Kelemahan itu, antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer/pemilik dan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM, hal ini juga membuktikan bahwa usaha kecil di Indonesia cenderung untuk memilih perhitungan normal tanpa menyusun laporan keuangan (Wahdini dan Suhairi, 2006). Oleh karena itu sumber daya manusia baik koperasi maupun UKM yang ada harus diberdayakan agar mampu menyusun laporan keuangan yang handal.

Laporan keuangan adalah informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan atau yang biasa disebut *stakeholder*. Informasi menjadi satu komoditas yang memegang peranan yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan perkembangan perekonomian adalah tersedianya arus informasi yang lancar dan mudah didapatkan. Tidak terkecuali bagi para pelaku usaha, informasi menjadi dasar pedoman bagi mereka untuk mengambil keputusan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Untuk memudahkan dalam memahami laporan keuangan, maka dibutuhkan suatu standar akuntansi, dimana standar tersebut

menjadi pedoman atas penyusunan laporan keuangan yang diterima dan diaplikasikan secara umum.

Koperasi pada awalnya dalam penyusunan laporan keuangannya telah diatur untuk berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor : 27 tentang akuntansi perkoperasian. Namun seiring adanya konvergensi ke *International Financial Reporting Standart* (IFRS) maka berdampak pada pencabutan PSAK nomor 27 yang dibuktikan dengan surat resmi yaitu *Exposure draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PPSAK) No.8 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Oktober 2010, jadi seharusnya koperasi telah berpedoman pada IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya, namun hal itu dirasa memberatkan koperasi sehingga dikeluarkanlah surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 pada tanggal 20 Desember 2011 yang menyatakan entitas koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) (www.diskopjatim.go.id).

Bagi UKM, hingga kini belum ada aturan secara khusus mengenai kewajiban dalam menyusun laporan keuangan, namun dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tidak langsung telah mengisyaratkannya melalui pasal 66 yang berbunyi “Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir dan laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi

keuangan”. Dengan demikian, bagi suatu perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, tidak terkecuali usaha kecil ataupun menengah diwajibkan menyusun laporan keuangan. Namun dalam penelitian Wahdini dan Suhairi (2006) menyatakan SAK yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia memberatkan bagi UKM karena UKM harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dengan menyusun laporan keuangan. Akan tetapi dengan terbitnya SAK ETAP sebagai pedoman akuntansi yang baru, diharapkan UKM dapat menyusun laporan keuangan dengan berpedoman pada SAK ETAP.

SAK ETAP sendiri diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk mempermudah entitas kecil atau menengah dalam menyusun laporan keuangannya karena lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum. Dengan diadopsinya SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan yang baru maka manajer, pemilik usaha ataupun staf keuangan sebagai pelaku pada koperasi maupun non-koperasi harusnya menguasai ketentuan dan penggunaan SAK ETAP. Penerapan SAK ETAP dalam entitas bisnis relatif baru karena SAK ETAP baru berlaku efektif mulai 1 Januari 2011 dan penerapan dini mulai 1 Januari 2010 diperbolehkan, karena relatif baru maka banyak orang yang belum tahu dan paham mengenai SAK ETAP itu sendiri. Padahal tingkat pemahaman pada suatu standar akan menggambarkan kesiapan mengaplikasikan standar itu dalam entitas bisnis dengan baik.

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, badan usaha koperasi telah

berpedoman pada SAK ETAP dan UKM juga diharapkan berpedoman pada SAK ETAP namun sebetulnya tidak ada ketentuan yang mewajibkan laporan keuangan UKM sesuai SAK ETAP. Dengan melihat fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Pelaku Koperasi dan Non-Koperasi Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan pemahaman antara pelaku koperasi dengan pelaku non-koperasi terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pemahaman pelaku koperasi maupun non-koperasi terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pemahaman antara pelaku koperasi dan non-koperasi terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi
 - a. Memperkaya wawasan akuntan pendidik dan mahasiswa terkait isu akuntansi terutama mengenai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama.

2. Bagi koperasi dan non-koperasi

Memberikan sumbangsih pemikiran dan memperkaya wawasan pelaku usaha tentang standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP).

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah didalam penulisan, penguraian serta penjelasan didalam penulisan skripsi ini maka penulis membagi dalam lima bagian, yang dimana meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang terkait dengan penelitian terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian. Selain itu juga menyajikan kerangka pemikiran, dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan hal-hal mengenai rancangan dan batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas mengenai hasil dari analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait.